



JURNAL TRANSFORMASI

JURNAL TEOLOGI DAN KEPEMIMPINAN

ISSN (online): 2985-4857. Volume 5 Nomor 1 (Mei 2026)

<https://journal.sttintibandung.ac.id/index.php/JT>

STT INTI BANDUNG Jl. Pasirkoja 58 Bandung Jawa Barat 40241

Kepemimpinan Inklusif: Menakar Misi Perempuan dalam Eklesiologi Modern

Ibrahim

Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia Makassar

ibrahimeppang@sttblessing.ac.id

Article History Submitted: 10 Januari 2026 Accepted: 29 April 2026 Published: 19 Mei 2026	Keywords: <i>church leadership; contemporary; ecclesiology; inclusiveness; patriarchy; women.</i> Kata Kunci: eklesiologi; inklusifitas; kepemimpinan gereja; kontemporer; patriarki; perempuan.
---	---

Abstrak

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan di Gereja merupakan isu teologis yang terus mengemuka di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan untuk meneliti secara kritis peran dan legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Gereja melalui pendekatan eklesiologis yang eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi analisis teks alkitabiah, studi sejarah gereja, dan analisis sosial budaya praktik kepemimpinan gereja. Hasilnya menunjukkan bahwa kendala pada kepemimpinan perempuan lebih dipengaruhi oleh warisan patriarki yang dilembagakan dalam tradisi dan struktur gereja daripada oleh kesaksian alkitabiah secara keseluruhan. Analisis interpretatif dari teks-teks kontroversial menunjukkan bahwa larangan perempuan bersifat kontekstual dan tidak langsung, bukan normatif-universal. Artikel ini menegaskan bahwa paradigma kepemimpinan inklusif yang berakar pada karunia Roh Kudus, doktrin imago Dei, dan pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus adalah model eklesiologis yang teologis, relevan, dan transformasional. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan gereja tidak hanya sah secara alkitabiah, tetapi juga penting untuk integritas dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia modern.

Abstract

The debate on women's leadership in the Church is a theological issue that continues to emerge in the midst of social change and increasing awareness of gender equality. This article aims to critically examine the role and legitimacy of women's leadership in the Church through an exclusively ecclesiological approach. This research uses a qualitative method with a literature review, including the analysis of biblical texts, the study of church history, and a socio-cultural analysis of leadership practices in the church. The results show that constraints on women's leadership are influenced more by patriarchal inheritances institutionalized in church traditions and structures than by biblical witness as a whole. Interpretive analysis of controversial texts shows that women's bans are contextual and indirect, not normative-universal. This article asserts that an inclusive leadership paradigm rooted in the gift of the Holy Spirit, the doctrine of imago Dei, and the understanding of the church as the body of Christ is an ecclesiological model that is theological, relevant, and

transformational. Therefore, women's participation in church leadership is not only biblically valid, but also essential to the integrity and witness of the church in the midst of the modern world.

PENDAHULUAN

Isu kepemimpinan perempuan dalam gereja tetap menjadi salah satu diskursus teologis yang kompleks dan berkelanjutan dalam kekristenan, baik pada ranah doktrinal maupun praksis eklesial. Di tengah perkembangan global yang menekankan kesetaraan gender dan pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam ruang publik, gereja menghadapi ketegangan antara mempertahankan tradisi teologis yang diwariskan dan merespons tuntutan kontekstual zaman. Ketegangan ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan tidak hanya bersifat internal-teologis, tetapi juga terkait erat dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Akibatnya, isu ini tetap aktual dan menjadi bagian dari pergumulan gereja dalam menjaga relevansi dan integritas imannya.

Dalam praktiknya, terdapat keragaman sikap di antara denominasi gereja terhadap kepemimpinan perempuan. Sebagian gereja telah membuka ruang bagi perempuan untuk melayani dalam berbagai posisi strategis, termasuk kepemimpinan struktural tertinggi, sementara sebagian lainnya masih membatasi dengan alasan interpretasi tekstual tertentu atau kesinambungan tradisi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan tidak dapat direduksi semata-mata pada teks Alkitab, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan budaya, termasuk kuatnya pengaruh sistem patriarki dalam membentuk struktur dan praktik gereja.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa isu kepemimpinan perempuan dalam gereja telah diteliti secara luas, namun masih menyisakan celah analitis. Penelitian oleh Zurlo dan Coles menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam berbagai gerakan gereja kontemporer, khususnya di Asia dan Afrika, bahkan dalam banyak kasus menjadi bagian penting dari pertumbuhan gereja.¹ Namun demikian, studi ini lebih bersifat deskriptif-historis dan belum secara kritis mengkaji bagaimana proses institusionalisasi gereja kemudian membatasi peran kepemimpinan perempuan melalui konstruksi teologis tertentu. Selanjutnya, Stephenson menegaskan bahwa dalam konteks Pentakostalisme global yang mayoritas anggotanya adalah Perempuan terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan kajian teologi feminis dalam diskursus kepemimpinan gereja.²

¹ Gina A. Zurlo and Dave Coles, "Women, Leadership, and Movements: A Critical Look at the Past, Present, and Future," *Missiology: An International Review* 53, no. 2 (April 13, 2025): 119–30, doi:10.1177/00918296241259205.

² Lisa P. Stephenson, "Feminist and Womanist Pentecostal Theologies: Contributions to the Conversation," *Journal of Pentecostal and Charismatic Christianity* 44, no. 1 (January 2, 2024): 1–2, doi:10.1080/27691616.2024.2335768.

Meskipun demikian, kajian ini masih berfokus pada pengembangan wacana teologis dan belum secara komprehensif mengaitkannya dengan praktik konkret kepemimpinan gereja lintas tradisi.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Lumintang menunjukkan bahwa perempuan awam telah lama terlibat dalam misi gereja, tetapi sering kali mengalami marginalisasi dalam struktur kepemimpinan formal.³ Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek praksis misi dan belum menguraikan secara mendalam relasi antara marginalisasi tersebut dengan konstruksi teologis dan budaya patriarki yang lebih luas. Demikian pula, penelitian Tampilang dkk. yang mengkaji teks 1 Timotius 2:8-15 menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan sering kali didasarkan pada interpretasi tekstual tertentu.⁴ Akan tetapi, pendekatan ini masih terbatas pada analisis eksegetis dan belum mengintegrasikannya dengan analisis sosial-budaya yang memengaruhi proses penafsiran tersebut.

Selain itu, refleksi teologi feminis kontemporer juga menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam gereja tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang telah mengakar dalam sejarah kekristenan.⁵ Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat normatif-kritis tanpa menghadirkan sintesis interdisipliner yang menghubungkan dimensi biblikal, historis, dan sosial secara simultan.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan biblikal, historis, dan sosial-budaya secara kritis dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi teks dan tradisi, tetapi juga menelusuri bagaimana konstruksi patriarki membentuk interpretasi teologis dan praktik gereja secara berkelanjutan. Dengan demikian, studi ini menawarkan perspektif eklesiologis yang lebih transformatif, yang tidak berhenti pada kritik, tetapi juga mengarah pada rekonstruksi pemahaman kepemimpinan gereja yang inklusif, partisipatif, dan berakar pada prinsip *imago Dei*.

Bertolak dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dinamika historis dan teologis membentuk pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam gereja; (2) sejauh mana praktik pembatasan kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya patriarkal; dan (3) bagaimana gereja dapat merekonstruksi model kepemimpinan yang lebih inklusif dan kontekstual tanpa kehilangan dasar teologisnya. Penelitian ini

³ Merlin Brenda Angeline Lumintang, "Resurrection Leadership Sebagai Model Kepemimpinan Bagi Perempuan Awam Merespons Panggilan Misi Allah," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 6, no. 1 (June 15, 2025): 33–49, doi:10.34307/kinaa.v6i1.198.

⁴ Risno Tampilang, Feyby Chaeren Letunggamu, and Christian Yafet Manambe, "Paul's and the Position of Women in Worship Service: Study of 1 Timothy 2:8-15," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 8, no. 2 (July 31, 2024): 183–202, doi:10.46445/ejti.v8i2.787.

⁵ Edi Sugianto and Christian Ade Maranatha, "REFLEKSI BIBLIS-TEOLOGIS TERHADAP TEOLOGI FEMINIS (BIBLIS-THEOLOGICAL REFLECTION OF FEMINIST THEOLOGY)," *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1, no. 2 (2019): 184–209.

juga berangkat dari hipotesis bahwa pembatasan kepemimpinan perempuan dalam banyak konteks gereja lebih merupakan hasil konstruksi sosial yang terinternalisasi dalam teologi, daripada refleksi utuh dari kesaksian Alkitab.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dinamika biblikal, historis, dan sosial yang membentuk pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam gereja, sekaligus merumuskan suatu kerangka eklesiologis yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teologis yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga profetis, dalam mendorong gereja mewujudkan kepemimpinan yang adil, partisipatif, dan setia pada Injil di tengah perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi yang bersifat deskriptif, analitis, dan kritis, karena berfokus pada kajian teks, tradisi, dan pemikiran teologis terkait kepemimpinan perempuan dalam gereja. Data penelitian bersumber dari bahan primer berupa teks-teks Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, serta bahan sekunder yang mencakup literatur teologi, kajian eklesiologi, sejarah gereja, studi sosial-budaya, dan artikel jurnal ilmiah mutakhir untuk menjamin relevansi akademik.

Analisis dilakukan melalui pendekatan historis-kontekstual untuk memahami latar sosial dan budaya teks serta perkembangan tradisi gereja, pendekatan eksegesis untuk menafsirkan teks-teks yang dianggap kontroversial, serta pendekatan teologi sistematis untuk merumuskan kerangka konseptual kepemimpinan yang inklusif. Seluruh data kemudian diolah dengan metode interpretatif-kritis guna mengidentifikasi pengaruh konstruksi patriarki dalam tradisi gereja serta menilai implikasinya terhadap praktik kepemimpinan kontemporer. Proses penelitian dilaksanakan secara bertahap melalui pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi berdasarkan tema utama, analisis integratif, interpretasi kritis, sintesis teologis, dan perumusan model konseptual. Melalui pendekatan interdisipliner ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman teologis yang komprehensif, kontekstual, dan aplikatif bagi pembaruan praktik kepemimpinan gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Warisan Patriarki Dalam Gereja

Gereja sejak awal tidak hadir dalam ruang yang netral, melainkan tumbuh di tengah sistem sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Dalam tradisi Yahudi, struktur keagamaan seperti silsilah, warisan, dan imamat didominasi laki-laki, sementara perempuan lebih dibatasi pada ranah domestik. Kondisi serupa juga tampak dalam budaya Yunani-Romawi, di mana

laki-laki menguasai ruang publik dan perempuan memiliki hak yang terbatas, diperkuat oleh sistem pater familias yang memberi otoritas penuh kepada kepala keluarga laki-laki.⁶

Dalam konteks inilah gereja mula-mula berkembang, sehingga struktur dan pola kepemimpinannya tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki. Meskipun Injil membawa pesan kesetaraan, praktik gereja sering kali bernegosiasi dengan nilai budaya yang dominan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa proses institusionalisasi gereja justru semakin memperkuat model kepemimpinan yang berpusat pada laki-laki melalui pengaruh hierarki Romawi dan tradisi Yahudi.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa patriarki bukan hanya latar sosial, tetapi turut membentuk struktur dan praktik gereja secara historis. Namun, penelitian sebelumnya umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara kritis menjelaskan bagaimana warisan ini terus memengaruhi teologi dan praktik kepemimpinan gereja masa kini. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih integratif untuk menelusuri relasi antara sejarah, budaya, dan konstruksi teologis dalam membentuk kepemimpinan gereja.

Perempuan Dalam Gereja Mula-mula

Meskipun gereja mula-mula berkembang dalam konteks patriarki, kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan dan pertumbuhan komunitas Kristen awal. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal, Injil telah mengandung semangat kesetaraan dan partisipasi. Salah satu contoh penting adalah Maria Magdalena yang dipercaya sebagai saksi pertama kebangkitan Kristus. Dalam budaya yang tidak mengakui kesaksian perempuan secara hukum, peristiwa ini memiliki makna teologis yang kuat dan menunjukkan sikap Yesus yang melampaui batasan budaya.

Selain itu, sejumlah tokoh perempuan lain juga berperan aktif dalam pelayanan gereja. Febe (Roma 16:1) disebut sebagai diakonos dan prostatis, yang mengindikasikan fungsi pelayanan dan kepemimpinan. Priskila bersama Akwila terlibat dalam pengajaran Apolos (Kis. 18:26), bahkan namanya kerap disebut lebih dahulu, yang dapat mencerminkan peran pentingnya. Junia (Roma 16:7) diakui sebagai bagian dari para rasul, sementara Lidia (Kis. 16:14–15) dikenal sebagai pemimpin rumah tangga yang menjadi pusat persekutuan jemaat di Filipi. Trifena dan Trifosa (Roma 16:12) juga digambarkan sebagai pekerja yang setia dalam pelayanan Tuhan.

⁶ Shifra Bronznick, Didi Goldenhar, and Joanna Samuels, "Women as Leaders in Judaism," in *Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook* (2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States : SAGE Publications, Inc., 2010), 513–22, doi:10.4135/9781412979344.n54.

⁷ David Crego and Alexander William Salter, "Constitutional Political Economy of the Early Church in 1 Clement," *SSRN Electronic Journal*, 2025, doi:10.2139/ssrn.5205582.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pengikut pasif, tetapi terlibat aktif dalam misi dan pelayanan gereja. Namun, kajian Kim menunjukkan bahwa peran tersebut mulai mengalami pembatasan seiring dengan proses institusionalisasi gereja.⁸ Ketika gereja beralih dari gerakan yang bersifat karismatik ke struktur yang lebih formal dan hierarkis, kontribusi perempuan semakin terpinggirkan. Akibatnya, peran penting mereka dalam periode awal gereja tidak lagi tampak secara jelas dalam tradisi dan catatan resmi, yang kemudian menjadi awal dari marginalisasi perempuan dalam kepemimpinan gereja.

Konsolidasi Patriarki Dalam Tradisi Gereja

Pada periode pasca-apostolik hingga era Bapa-bapa gereja, sistem patriarki semakin dikokohkan dalam kehidupan gereja melalui berbagai keputusan konsili yang membatasi keterlibatan perempuan dalam liturgi dan kepemimpinan. Pembatasan ini sering didasarkan pada penafsiran terhadap teks seperti 1 Korintus 14:34–35 dan 1 Timotius 2:11–12. Namun, penafsiran tersebut umumnya bersifat literal dan kurang mempertimbangkan konteks historis serta sosial, sehingga mengabaikan kesaksian Alkitab lain yang menunjukkan peran aktif perempuan.

Tradisi gereja kemudian membakukan pandangan bahwa perempuan harus diam, tunduk, dan tidak mengajar, yang pada akhirnya membentuk kerangka teologis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Tertullianus, Agustinus, dan Thomas Aquinas turut memperkuat pandangan ini dengan menghadirkan citra perempuan yang ambivalen di satu sisi dihargai, namun di sisi lain dipandang sebagai lemah dan dekat dengan dosa.⁹

Ketika jabatan sakramental seperti imamat dibatasi hanya bagi laki-laki, patriarki menjadi bagian dari doktrin teologis, bukan sekadar praktik sosial. Bahkan semangat Reformasi Protestan belum sepenuhnya menghapus pola ini, karena perempuan tetap ditempatkan dalam peran sekunder. Dengan demikian, sejarah gereja memperlihatkan proses berkelanjutan dalam membatasi peran perempuan melalui tafsir teologis dan struktur kelembagaan, sehingga patriarki mengakar kuat dalam kehidupan gereja hingga masa kini.

Tinjauan Eksegesis Teks-teks Kontroversial

1 Timotius 2:12 dan Penafsiran Kontekstual

Ayat, "Aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar atau mendominasi laki-laki; biarlah ia diam/tenang", kerap dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan perempuan dalam

⁸ Eunha Kim, "The Growth, Decline, and Transformation of the Diaconal Ministry and the Role of Women Deaconesses in the Early Churches," *Religions* 14, no. 11 (November 12, 2023): 1415, doi:10.3390/rel14111415.

⁹ Francisco J. Romero Carrasquillo and Hilaire K. Troyer de Romero, "Aquinas on the Inferiority of Woman," *American Catholic Philosophical Quarterly* 87, no. 4 (2013): 685–710, doi:10.5840/acpq201387452.

gereja. Namun, penafsiran yang komprehensif menuntut analisis linguistik, konteks historis, dan tujuan pastoral surat tersebut. Surat 1 Timotius ditujukan kepada Timotius yang melayani di Efesus, kota yang dipengaruhi kultus Artemis, di mana perempuan memiliki peran religius yang signifikan. Banyak petobat baru berasal dari latar belakang keagamaan campuran dengan pemahaman teologis terbatas.¹⁰ Ibrahim dkk mempertegas bahwa dalam konteks ini, larangan Paulus dapat dipahami sebagai langkah pastoral untuk menertibkan ajaran menyimpang dan praktik yang tidak terdidik. Penafsiran sering dilakukan secara literal dan ahistoris, yang secara sepintas terlihat membatasi peran perempuan.¹¹ Pembacaan literal seperti ini cenderung mengabaikan konteks budaya dan sosial di mana teks tersebut ditulis, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaku dan membatasi.

Istilah Yunani *authentein* yang sering diterjemahkan “memerintah” tidak sama dengan *exousia* (otoritas umum), melainkan memiliki nuansa negatif seperti “menguasai secara sewenang-wenang.”¹² Dengan demikian, Paulus kemungkinan tidak melarang perempuan mengajar secara mutlak, melainkan menolak sikap otoriter yang merusak ketertiban jemaat. Larangan ini bersifat lokal dan kontekstual, bukan universal, dengan tujuan membangun relasi yang sehat dalam komunitas, bukan membatasi gender dalam pelayanan.

1 Korintus 14:34–35: Larangan atau Peraturan

Pernyataan, “Wanita hendaknya diam di pertemuan gereja”, tampak absolut, tetapi menjadi problematis jika dibandingkan dengan 1 Korintus 11:5 yang mengakui perempuan berdoa dan bernubuat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi Paulus. Dua pendekatan utama muncul. Pertama, kritik tekstual tokoh seperti Gordon Fee berpendapat bahwa ayat 34–35 kemungkinan merupakan sisipan karena variasi posisi dalam manuskrip. Kedua, pendekatan kontekstual Paulus tidak melarang perempuan berbicara secara umum, melainkan menertibkan perilaku yang mengganggu ibadah, seperti pertanyaan spontan dari mereka yang belum terdidik secara formal. Dengan demikian, perintah “diam” lebih tepat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban liturgis, bukan pelarangan universal.

Kedua pendekatan ini menegaskan bahwa larangan tersebut bersifat situasional dan pastoral. Fokus utama Paulus adalah ibadah yang tertib dan membangun, bukan pembatasan partisipasi perempuan.

¹⁰ Yunita Stella, “Kepemimpinan Wanita Dalam Gereja,” *Journal Kerusso* 8, no. 1 (2023): 1–9, doi:10.33856/kerusso.v8i1.267.

¹¹ Ibrahim Ibrahim, Noviyanti Pangalingan, and Aprianus Malan, “Koinonia vs Patriarki: Menafsirkan Kepemimpinan Perempuan Dalam Lensa Filsafat Teologi,” *Jurnal Bajidakka* 1, no. 1 (2025): 30–49, <https://jurnal.stintim.id/index.php/bj>.

¹² Cynthia Long. Westfall, *Paul and Gender: Reclaiming the Apostle’s Vision for Men and Women in Christ* (Baker Academic, a division of Baker Publishing Group, 2016). 348

Narasi Alkitab yang Mendukung Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan

Meskipun beberapa teks tampak membatasi, keseluruhan kesaksian Alkitab justru menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam karya Allah. Dalam Perjanjian Lama, Debora (Hak. 4-5) tampil sebagai hakim dan nabi, Hulda (2Raj. 22:14-20) sebagai otoritas kenabian, dan Ester sebagai penyelamat umat melalui kepemimpinan politik. Dalam Perjanjian Baru, pola ini berlanjut: Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan dan dikenal sebagai “rasul bagi para rasul”; Febe (Rm. 16:1-2) disebut sebagai diaken dan pelindung; Junia (Rm. 16:7) diakui sebagai rasul; dan Lidia (Kis. 16:14-15) berperan sebagai pemimpin jemaat rumah. Fakta bahwa nama Junia kemudian dimaskulinisasi menunjukkan adanya pengaruh bias patriarkal dalam tradisi penafsiran.¹³

Kesaksian ini menegaskan bahwa panggilan dan karunia tidak dibatasi oleh gender. Karena itu, teks-teks preskriptif perlu dibaca dalam terang keseluruhan narasi Alkitab yang inklusif. Penafsiran yang adil harus bersifat kontekstual, berlandaskan kasih, keadilan, dan misi Allah. Dengan demikian, pembacaan harafiah yang sempit cenderung menghasilkan bias gender, sedangkan pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa Alkitab mendukung keterlibatan perempuan dalam pelayanan dan kepemimpinan. Gereja, karenanya, perlu meninjau kembali warisan teologisnya agar lebih setia pada semangat Injil yang membebaskan dan memulihkan relasi manusia di hadapan Allah.

Paradigma Kepemimpinan Inklusif

Paradigma kepemimpinan inklusif di gereja tidak hanya merupakan tanggapan terhadap tuntutan zaman modern atau masalah kesetaraan gender, tetapi berakar kuat dalam ajaran Kitab Suci dan teologi Kristen. Menurut pandangan ini, panggilan dan karunia kepemimpinan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa pun yang menghendakinya. Oleh karena itu, kepemimpinan inklusif dipahami sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan yang menegaskan kesetaraan dan partisipasi semua orang dalam pekerjaan keselamatan. Ada tiga prinsip teologis utama yang membentuk dasar dari contoh ini:

Karunia Mendahului Gender: Roh Kudus sebagai Sumber Panggilan

Salah satu fondasi utama kepemimpinan inklusif adalah bahwa karunia rohani dianugerahkan oleh Roh Kudus tanpa memperhatikan perbedaan biologis. Dalam surat-surat Paulus (1 Korintus 12; Roma 12; Dalam Efesus 4), ia menjelaskan bahwa berbagai karunia, seperti pengajaran, nasihat, pengembalaan, nubuat, dan bimbingan, "diberikan kepada setiap orang sesuai kehendaknya." Tidak ada indikasi bahwa distribusi hadiah tersebut dibatasi oleh jenis kelamin. Artinya, otoritas pelayanan di Gereja tidak didasarkan pada perbedaan fisik antara pria dan wanita, tetapi pada pekerjaan Roh

¹³ Andrea Hartmann, “Junia – A Woman Lost in Translation: The Name IOYNIAN in Romans 16:7 and Its History of Interpretation,” *Open Theology* 6, no. 1 (November 19, 2020): 646–60, doi:10.1515/opth-2020-0138.

Kudus yang memanggil dan memperlengkapi setiap orang untuk melayani.¹⁴ Ketika Gereja menolak karunia yang diberikan kepada perempuan, itu sebenarnya menolak bagian dari pekerjaan Roh itu sendiri.

Kisah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2:17-18 adalah bukti kuat bahwa Roh Kudus menguatkan semua orang: "*Anak laki-laki dan perempuanmu akan bernubuat.*" Nubuat Yoel yang digenapi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan rohani bersifat universal dan menandai datangnya zaman baru di mana setiap orang percaya akan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Gereja, yang menutup ruang bagi wanita untuk menggunakan karunia mereka, mengabaikan tanda-tanda kehadiran Kerajaan Allah, di mana Roh Kudus bekerja.

Imago Dei dan Kesetaraan Ontologis

Kejadian 1:27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, "laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya", yang menjadi dasar teologis bagi kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Dalam kerangka imago Dei, laki-laki dan perempuan memiliki martabat, nilai, dan potensi spiritual yang setara untuk merefleksikan karakter dan karya Allah di dunia.

Berdasarkan hal ini, diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemimpinan gereja bukan sekadar persoalan sosial, melainkan juga pelanggaran teologis terhadap hakikat penciptaan. Drew menilai bahwa pembatasan berbasis gender mencerminkan distorsi relasi akibat dosa, bukan kehendak awal Allah.¹⁵ Karena itu, pemulihan relasi laki-laki dan perempuan dalam pelayanan merupakan bagian dari karya penebusan Kristus.

Pemikiran teolog seperti Katharina LaCugna dan Jürgen Moltmann juga menegaskan bahwa relasi dalam Tritunggal bersifat setara dan partisipatif, bukan hierarkis. Jika gereja mencerminkan persekutuan Trinitas, maka relasi dalam tubuh Kristus seharusnya inklusif, saling melengkapi, dan berlandaskan kasih, bukan dominasi. Struktur patriarki, dengan demikian, menyimpang dari model relasional ilahi.¹⁶

Jadi, imago Dei menjadi dasar antropologis bagi gereja yang inklusif, dimana setiap orang dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya Allah tanpa dibatasi oleh gender, status sosial, atau latar budaya. Pengakuan ini merupakan langkah awal menuju gereja yang adil dan transformatif.

¹⁴ Setiawan Larosa, Serepina Yoshika Hasibuan, and Daniel Daniel, "Metode Pemberdayaan Karunia Dalam 1 Korintus 12:1-31 Bagi Pelayanan Gereja," *Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (December 13, 2023): 89–104, doi:10.37465/shiftkey.v13i2.392.

¹⁵ Arlyn S. Drew, "Unbinding Genesis 3:16: A Theocentric Critique of Sex-Based Power," *Religions* 15, no. 10 (October 7, 2024): 1214, doi:10.3390/rel15101214.

¹⁶ Minggus Minarto Pranoto, "PEREMPUAN PEMIMPIN DI GEREJA ISA ALMASIH: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEOLOGI FEMINIS DAN RENEWAL THEOLOGY," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja* 2, no. 2 (2018): 15–31, doi:10.37368/ja.v2i2.29.

Tubuh Kristus Sebagai Komunitas Partisipatif

Paulus dalam 1 Korintus 12 menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota dengan fungsi berbeda namun saling melengkapi. Ia menegaskan bahwa “mata tidak dapat berkata kepada tangan: Aku tidak membutuhkan engkau” (ay. 21), dan bahwa bagian yang dianggap lemah justru mendapat perhatian lebih (ay. 22-24). Gambaran ini menunjukkan bahwa setiap anggota memiliki peran penting bagi kesatuan dan pertumbuhan gereja. Dalam kerangka ini, pembatasan terhadap perempuan dalam kepemimpinan berarti mengabaikan sebagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Hal tersebut tidak hanya menciptakan ketimpangan struktural, tetapi juga melemahkan fungsi gereja secara keseluruhan, karena karunia yang Tuhan berikan kepada perempuan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Paradigma kepemimpinan inklusif memandang gereja bukan sebagai struktur hierarkis, melainkan sebagai komunitas hidup yang ditandai oleh pelayanan timbal balik. Kepemimpinan dipahami sebagai wujud pelayanan dalam kasih dan kerendahan hati, sebagaimana diteladankan Yesus yang melibatkan perempuan dalam pelayanan-Nya (Luk. 8:1-3) dan mempercayakan mereka sebagai saksi kebangkitan (Yoh. 20:17). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan bukanlah penyimpangan, melainkan kelanjutan dari teladan Kristus.

Kepemimpinan inklusif berarti membuka ruang bagi setiap karunia tanpa diskriminasi. Ini bukan sekadar respons terhadap tuntutan zaman, tetapi wujud ketaatan pada prinsip Injil: karya Roh Kudus yang universal, kesetaraan dalam penciptaan, dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Gereja yang mengabaikan prinsip ini berisiko kehilangan vitalitas rohaninya, sedangkan yang menerapkannya akan menjadi saksi nyata kasih dan keadilan Allah.

Jadi, teologi kepemimpinan inklusif berakar pada iman Kristen yang mendasar: Roh Kudus memanggil semua orang tanpa membedakan gender, manusia diciptakan setara, dan gereja hanya berfungsi utuh jika semua anggotanya diberi ruang untuk berpartisipasi. Prinsip ini meneguhkan gereja sebagai komunitas yang setia pada Injil yang membebaskan dan memulihkan.

Tantangan dan Resistensi Dalam Praktik

Walaupun dasar teologis dan biblika yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan gereja cukup kuat, penerapannya di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Paradigma kepemimpinan inklusif masih menghadapi resistensi yang bersifat ideologis, kultural, dan struktural, yang juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis para pemimpin perempuan.

Di banyak gereja, khususnya yang bertradisi konservatif, penafsiran literal terhadap teks seperti 1 Timotius 2:12 dan 1 Korintus 14:34–35 tetap dominan. Ayat-ayat ini sering dijadikan dasar untuk membatasi perempuan berbicara di mimbar atau memimpin jemaat, tanpa mempertimbangkan

konteks historis dan sosialnya.¹⁷ Akibatnya, kepemimpinan dipandang sebagai hak laki-laki, sementara perempuan diarahkan pada peran pendukung.

Hal yang sama diungkapkan Natar bahwa faktor budaya turut memperkuat pola patriarki. Dalam konteks Asia, termasuk Indonesia, perempuan kerap dipandang sebagai sosok yang harus patuh dan tidak layak tampil sebagai pemimpin publik.¹⁸ Pola pikir ini kemudian diadopsi dalam kehidupan gereja dan sering dibenarkan secara teologis, padahal sejatinya berakar pada konstruksi sosial.

Hambatan lain muncul dari aspek politik gerejawi. Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan kadang bukan karena alasan teologis, melainkan kekhawatiran akan hilangnya kekuasaan dan pengaruh. Di sisi lain, ketakutan akan perpecahan membuat sebagian pemimpin memilih mempertahankan status quo, sehingga perubahan berjalan lambat meskipun kesadaran teologis mulai berkembang.

Kendala struktural juga tampak dalam minimnya dukungan kelembagaan. Banyak perempuan memiliki panggilan dan kapasitas pelayanan, tetapi terbatas oleh kurangnya sistem pembinaan. Bahkan di gereja yang secara teologis terbuka, struktur kepemimpinan, kurikulum teologi, dan proses pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki, menciptakan “atap kaca” yang menghambat perempuan mencapai posisi strategis.

Di tingkat personal, pemimpin perempuan sering menghadapi beban ganda antara pelayanan dan tanggung jawab domestik. Mereka juga cenderung mengalami pengawasan lebih ketat, diragukan kompetensinya, atau diberi label negatif ketika bersikap tegas. Tekanan ini dapat memicu kelelahan emosional, bahkan mendorong sebagian untuk mundur dari kepemimpinan, bukan karena kurang panggilan, tetapi karena minimnya dukungan. Selain itu, kurangnya dialog teologis terbuka turut memperlambat perubahan. Banyak gereja belum secara serius mendiskusikan isu ini secara mendalam, sehingga penolakan sering lahir dari ketidaktahuan, bukan refleksi teologis yang matang. Karena itu, diperlukan upaya sadar melalui pengajaran, seminar, dan diskusi yang menegaskan bahwa pelayanan perempuan adalah bagian dari ketaatan kepada kehendak Allah.

Jadi, perjuangan menuju kepemimpinan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi gereja untuk melakukan refleksi kritis dan reformasi yang lebih setia pada nilai-nilai Injil. Pendekatan teologis yang kontekstual, keberanian pastoral, dan

¹⁷ Syutriska Gulo and Yayan Indrawan, “Larangan Perempuan Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Surat 1 Timotius 2:11-12 Dalam Konteks Isu Kesenjangan Gender,” *Paramathetes : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (November 30, 2023): 51–65, doi:10.64005/jtpk.v2i1.28.

¹⁸ Asnath N. Natar, “Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (July 30, 2019): 133, doi:10.14421/musawa.2019.182.133-147.

sistem pembinaan yang adil menjadi kunci menuju gereja yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Dinamika Kepemimpinan Perempuan di Gereja Modern

Untuk memahami dengan tepat bagaimana contoh kepemimpinan inklusif dialami dalam kehidupan paroki saat ini, penting untuk mengamati praktik yang terjadi dalam konteks gereja yang berbeda.¹⁹ Studi kasus memungkinkan kita untuk melihat ketegangan antara cita-cita teologis dan realitas sosial, serta bagaimana budaya, tradisi, dan struktur organisasi gereja memengaruhi penerimaan kepemimpinan perempuan.

Bagian ini menyoroti empat kerangka kerja utama:

1) Gereja Pentakosta dan Karismatik: Peluang Besar, Struktur Yang Masih Tertutup

Gerakan Pentakosta dan karismatik dikenal karena penekanannya pada pengalaman Roh Kudus dan karunia rohani yang terbuka untuk semua. Dalam kerangka ini, banyak wanita menemukan ruang untuk melayani sebagai penginjil, guru, pemimpin doa, dan bahkan penanam gereja. Tokoh-tokoh seperti Kathryn Kuhlman dan Cindy Jacobs menunjukkan bahwa pengakuan kepemimpinan perempuan dapat ditingkatkan secara organik melalui pengakuan karismatik terhadap gereja.²⁰

Namun, realitas struktural sering kali tidak sesuai dengan pengalaman spiritual ini. Meskipun wanita dapat memimpin jemaat atau pekerjaan misionaris, mereka sering tidak diizinkan untuk memegang jabatan resmi seperti ketua sinode atau penatua utama. Misalnya, di beberapa denominasi besar Indonesia, perempuan diizinkan untuk memimpin "cabang gereja", tetapi tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin tertinggi sinode.²¹ Situasi ini menggambarkan dikotomi antara pengakuan akan tindakan Roh Kudus dan sistem kelembagaan yang tetap patriarki.

Situasi ini sering disamakan sebagai "fungsi yang berbeda tetapi setara". Namun pada kenyataannya, perbedaan fungsi ini justru memperkuat ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, gereja Pantakosta dan karismatik menghadapi tantangan untuk mendamaikan semangat karismatik terbuka dengan struktur kelembagaan yang tetap tertutup terhadap kesetaraan gender.

2) Gereja Berdaulat Protestan: Pengakuan Resmi dan Tantangan Budaya

Beberapa denominasi Protestan yang dominan bahkan telah melangkah lebih jauh dengan secara resmi mengakui kepemimpinan perempuan. Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Protestan di Indonesia Barat (GPIB) dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) telah lama menahbiskan pendeta

¹⁹ Ibrahim Ibrahim, Yohanes Subianto Saputra, and Sardi Samjar, "Kajian Teologis Pelayanan Pastoral Berdasarkan Yohanes 21:15-17 Serta Implikasinya Dalam Penggembalaan Gereja Masa Kini," *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* | 263, no. 2 (2024): 263–77, doi:<https://doi.org/10.62738/ej.v4i2.85>.

²⁰ Margaret English de Alminana and Lois E. Olena, *Women in Pentecostal and Charismatic Ministry* (BRILL, 2016), doi:10.1163/9789004332546.

²¹ Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen."

perempuan dan menempatkan mereka pada posisi strategis, termasuk sebagai ketua sinode, ketua wilayah atau anggota badan pemerintahan tertinggi.²²

Sebagai contoh, GKI memiliki sejarah panjang dalam menguduskan pendeta perempuan dan secara terbuka menawarkan mereka kesempatan yang sama untuk memimpin gereja dan struktur organisasi. Demikian pula, GPIB dan GKJ terus mengadvokasi partisipasi perempuan dalam pelayanan sakramen dan pelayanan pastoral, meskipun dalam beberapa konteks budaya, seperti Jawa, tantangan sosial tetap sangat kuat.²³

Namun, keberhasilan formal ini tidak selalu disertai dengan penerimaan kultural di tingkat jemaat. Di beberapa daerah pedesaan, terutama yang masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat, kepemimpinan perempuan sering dianggap langka. Pendeta wanita sering dihadapkan pada pertanyaan tentang otoritas mereka dalam pelayanan sakramental atau dalam keputusan pastoral. Selain itu, promosi ke posisi tertinggi dalam struktur gereja, seperti kepala majelis atau kepala departemen sinodal, masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi struktural belum sepenuhnya disertai dengan perubahan mentalitas dan mentalitas kelembagaan.

3) Gereja Lokal di Indonesia: Polarisasi Antara Kota dan Desa

Konteks gereja lokal di Indonesia menunjukkan perbedaan besar dalam penerimaan kepemimpinan perempuan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Makassar, banyak gereja, baik arus utama maupun independen, telah menciptakan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkhotbah, menggembalakan jemaat, dan bahkan memimpin pelayanan lintas agama. Gereja kota umumnya lebih terbuka karena pengaruh pendidikan, akses ke wacana global, dan keterlibatan dengan nilai-nilai kesetaraan modern.

Di sisi lain, kepemimpinan perempuan sering dianggap tabu di daerah pedesaan atau daerah yang masih banyak dipengaruhi oleh minuman patriarki. Di beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara timur, Toraja dan sebagian Kalimantan, perempuan yang muncul sebagai pemimpin spiritual terkadang ditolak secara sosial atau dipandang sebagai pelanggaran norma budaya. Bahkan dalam konteks gereja yang secara dogmatis menerima perempuan sebagai pendeta, perlawanan muncul di tingkat lokal karena tekanan tradisi dan persepsi sosial.

Kasus gereja dengan latar belakang tradisional yang kuat, seperti Batak dan Minahasa, Toraja menggambarkan ambivalensi ini. Misalnya, dalam penelitianTangirerung dkk. menemukan bahwa

²² Meitha Sartika, "Penahbisan Wanita Sebagai Pendeta," *YSLK (Jurnal Pelita Zaman)*, 1997, <https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=775&res=jpz>.

²³ Nova Linda Romeantenan and Desi Sianipar, "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Di Lingkup Sinodal Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (Gpib): Suatu Tinjauan Teologis-Pedagogis," *Jurnal Shanan* 2, no. 2 (October 1, 2018): 131–58, doi:10.33541/shanan.v2i2.1539.

dalam Sejarah Kepemimpinan Gereja Toraja yang lebih luas, memilih perempuan untuk jabatan struktural masih minim serta menduduki jabatan struktural mungkin di bawah 10%.²⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa proses penerimaan kepemimpinan perempuan tidak hanya membutuhkan reformasi teologis, tetapi juga perubahan sosial dan budaya yang mendalam.

4) Gereja Universal: Kemajuan Signifikan dan Ketegangan Teologis

Di seluruh dunia, dinamika kepemimpinan perempuan menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tantangan yang kompleks. Di berbagai negara Barat, gereja-gereja besar seperti Gereja Anglikan, Gereja Metodis Bersatu (UMC), Gereja Presbiterian AS (PCUSA), dan Gereja Lutheran Injili di Amerika (ELCA) telah memberi wanita akses penuh ke pelayanan uskup, pendeta senior, dan pemimpin dewan. Faktanya, beberapa wanita saat ini menempati posisi tertinggi dalam struktur gereja dunia dan secara aktif terlibat dalam masalah keadilan sosial dan ekologi teologis.²⁵

Namun, di sisi lain, perbedaan pandangan teologis antara gereja-gereja di Barat dan di Global Selatan (Afrika, Asia, Amerika Latin) menyebabkan ketegangan. Banyak gereja di Selatan terus memegang pandangan konservatif dan menentang penahbisan wanita, dengan alasan kepercayaan mereka pada ajaran Alkitab. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam divisi internal dalam UMC dan Komuni Anglikan global, yang sebagian berasal dari perbedaan posisi gender dan kepemimpinan perempuan.²⁶

Situasi ini menunjukkan bahwa penerimaan perempuan dalam kepemimpinan gereja dipengaruhi oleh kombinasi faktor teologis, sejarah dan sosial-budaya. Sementara gereja-gereja Barat menekankan hermeneutika kontekstual dan prinsip keadilan, gereja-gereja di Selatan cenderung mempertahankan pendekatan literal terhadap teks-teks Alkitab. Ketegangan ini mencerminkan berbagai cara memahami otoritas Kitab Suci dan tantangan globalisasi teologi di zaman modern.

Oleh karena itu, upaya untuk gereja yang inklusif harus interdisipliner, kontekstual, menyeimbangkan refleksi teologis, perubahan struktural, dan transformasi budaya gereja. Gereja harus beralih dari sekadar menyambut perempuan ke dalam pelayanan menjadi mengakui dan memungkinkan mereka sebagai mitra yang setara dalam misi Tuhan.

Strategi Menuju Kepemimpinan Inklusif Yang Sehat

Upaya untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan gereja bukan hanya agenda sosial, tetapi panggilan teologis untuk membangun tubuh Kristus yang utuh dan liturgis.

²⁴ Johana Ruadjanna Tangirerung, Judith D. L. Wangania, and Meike Roselyna Tapparan, "Meneroka Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Gereja Dan Masyarakat Toraja," *KURIOS* 10, no. 2 (August 30, 2024): 320–33, doi:10.30995/kur.v10i2.826.

²⁵ Marjorie Procter-Smith, "Women and Religion in Modern America," in *The Cambridge History of Religions in America* (Cambridge University Press, 2009), 488–510, doi:10.1017/CHOL9780521871082.024.

²⁶ Victor Agadjanian, "Women's Religious Authority in a Sub-Saharan Setting," *Gender & Society* 29, no. 6 (December 7, 2015): 982–1008, doi:10.1177/0891243215602106.

Pergeseran menuju kepemimpinan inklusif membutuhkan langkah-langkah strategis terencana yang menyentuh dimensi teologis dan praktis.²⁷ Reformasi ini tidak dapat segera dilakukan. Ini membutuhkan proses pembelajaran, dialog, dan reformasi struktural yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, enam strategi yang diusulkan tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk suatu kerangka transformasi yang saling terkait.

Pertama, rekonstruksi teologi pelayanan berbasis karunia, bukan gender, menjadi fondasi epistemologis yang menegaskan bahwa otoritas pelayanan bersumber dari karya Roh Kudus, sebagaimana ditegaskan bahwa setiap orang menerima karunia “sesuai kehendaknya” (1 Korintus 12:11). Dengan demikian, artikel ini menegaskan pergeseran paradigma dari ontologi gender menuju pneumatologi karunia sebagai basis kepemimpinan gereja.

Kedua, kesetaraan akses terhadap pendidikan teologis dan jabatan kepemimpinan dipahami sebagai implikasi etis dari fondasi teologis tersebut. Tanpa distribusi kesempatan yang adil, pengakuan teologis akan kesetaraan akan tetap bersifat normatif dan tidak operasional. Oleh sebab itu, kajian ini menekankan pentingnya intervensi struktural seperti kebijakan afirmatif, representasi proporsional, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Ketiga, transformasi kultural jemaat melalui pengajaran kontekstual menjadi jembatan antara teologi dan praksis. Artikel ini menegaskan bahwa resistensi terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya bersumber dari doktrin, tetapi juga dari habitus budaya patriarkal. Dengan demikian, perubahan memerlukan strategi pedagogis yang berakar pada narasi Alkitab (misalnya Debora, Maria, Priskila, dan Febe) untuk membangun kesadaran teologis baru yang kontekstual.

Keempat, pengembangan mentoring lintas gender diposisikan sebagai mekanisme reproduksi kepemimpinan yang inklusif. Kontribusi penting di sini adalah penekanan bahwa regenerasi kepemimpinan tidak cukup melalui sistem formal, tetapi membutuhkan relasi pembinaan yang dialogis, setara, dan transformatif. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai sarana dekonstruksi relasi kuasa yang timpang dalam gereja.

Kelima, evaluasi kritis terhadap struktur gereja menggarisbawahi bahwa patriarki tidak hanya beroperasi pada level ide, tetapi juga terlembagakan dalam sistem organisasi. Oleh karena itu, artikel ini menempatkan reformasi struktural sebagai bagian integral dari teologi praktis, bukan sekadar kebijakan administratif.

Keenam, pembaruan liturgi dan simbol gereja diangkat sebagai dimensi performatif dari teologi inklusif. Liturgi tidak hanya mencerminkan teologi, tetapi juga membentuk kesadaran iman.

²⁷ Ibrahim Ibrahim, “Kapabilitas Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja Pada Masa Kini,” *EULOGIA* 2, no. 1 (2022): 38–51, doi:<https://doi.org/10.62738/ej.v2i1.21>.

Dengan demikian, penggunaan bahasa, simbol, dan praktik ibadah yang inklusif menjadi strategi kunci dalam mentransformasikan imajinasi teologis jemaat.

Secara sintesis, kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penegasan bahwa kepemimpinan inklusif bukan sekadar isu kesetaraan gender, melainkan ekspresi integral dari teologi gereja itu sendiri yang berakar pada karya Roh Kudus, kesetaraan dalam penciptaan, dan eklesiologi tubuh Kristus. Dengan mengintegrasikan analisis biblikal, sejarah gereja, dan pendekatan teologi praktis, artikel ini menawarkan kerangka konseptual sekaligus operasional bagi gereja untuk bergerak dari wacana menuju transformasi nyata.

Jadi, kepemimpinan inklusif dipahami bukan sebagai kompromi terhadap modernitas, tetapi sebagai bentuk kesetiaan terhadap Injil yang membebaskan dan memulihkan, serta sebagai langkah strategis untuk menghadirkan gereja yang lebih adil, partisipatif, dan relevan dalam konteks kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika historis dan teologis memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam gereja. Sejak gereja mula-mula hingga periode institusionalisasi, terjadi pergeseran dari praktik partisipatif menuju struktur yang semakin patriarkal. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi teologis, tetapi juga oleh interaksi dengan budaya Yahudi dan Greko-Romawi yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Dengan demikian, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan tidak lahir dalam ruang teologis yang netral, melainkan dalam dialektika antara teks, tradisi, dan konteks sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa praktik pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan dalam gereja sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya patriarkal yang kemudian terinternalisasi dalam penafsiran teologis. Analisis eksegetis terhadap teks-teks yang sering digunakan untuk membatasi perempuan menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat kontekstual, bukan universal. Sementara itu, kesaksian Alkitab secara menyeluruh justru memperlihatkan keterlibatan aktif perempuan dalam pelayanan dan kepemimpinan. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa pembatasan kepemimpinan perempuan lebih merupakan hasil konstruksi sosial yang dilegitimasi secara teologis, daripada refleksi utuh dari pesan Alkitab.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa gereja perlu merekonstruksi model kepemimpinan yang lebih inklusif dan kontekstual tanpa kehilangan dasar teologisnya. Rekonstruksi ini bertumpu pada prinsip-prinsip biblikal seperti *imago Dei*, karya Roh Kudus yang memberi karunia tanpa diskriminasi, serta pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus yang partisipatif. Implementasinya mencakup pembaruan teologi pelayanan, kesetaraan akses terhadap

pendidikan dan kepemimpinan, transformasi budaya jemaat, penguatan sistem mentoring, evaluasi struktur gereja, serta pembaruan liturgi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agadjanian, Victor. "Women's Religious Authority in a Sub-Saharan Setting." *Gender & Society* 29, no. 6 (December 7, 2015): 982–1008. doi:10.1177/0891243215602106.
- Bronznick, Shifra, Didi Goldenhar, and Joanna Samuels. "Women as Leaders in Judaism." In *Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook*, 513–22. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States : SAGE Publications, Inc., 2010. doi:10.4135/9781412979344.n54.
- Crego, David, and Alexander William Salter. "Constitutional Political Economy of the Early Church in 1 Clement." *SSRN Electronic Journal*, 2025. doi:10.2139/ssrn.5205582.
- Drew, Arlyn S. "Unbinding Genesis 3:16: A Theocentric Critique of Sex-Based Power." *Religions* 15, no. 10 (October 7, 2024): 1214. doi:10.3390/rel15101214.
- English de Alminana, Margaret, and Lois E. Olena. *Women in Pentecostal and Charismatic Ministry*. BRILL, 2016. doi:10.1163/9789004332546.
- Gulo, Syutriska, and Yayan Indrawan. "Larangan Perempuan Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Surat 1 Timotius 2:11-12 Dalam Konteks Isu Kesetaraan Gender." *Paramathetes : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (November 30, 2023): 51–65. doi:10.64005/jtpk.v2i1.28.
- Hartmann, Andrea. "Junia – A Woman Lost in Translation: The Name IOYNIAN in Romans 16:7 and Its History of Interpretation." *Open Theology* 6, no. 1 (November 19, 2020): 646–60. doi:10.1515/oph-2020-0138.
- Ibrahim, Ibrahim. "Kapabilitas Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja Pada Masa Kini." *EULOGIA* 2, no. 1 (2022): 38–51. doi:https://doi.org/10.62738/ej.v2i1.21.
- Ibrahim, Ibrahim, Noviyanti Pangalingan, and Aprianus Malan. "Koinonia vs Patriarki: Menafsirkan Kepemimpinan Perempuan Dalam Lensa Filsafat Teologi." *Jurnal Bajidakka* 1, no. 1 (2025): 30–49. https://jurnal.stintim.id/index.php/bj.
- Ibrahim, Ibrahim, Yohanes Subianto Saputra, and Sardi Samjar. "Kajian Teologis Pelayanan Pastoral Berdasarkan Yohanes 21:15-17 Serta Implikasinya Dalam Penggembalaan Gereja Masa Kini." *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* | 263, no. 2 (2024): 263–77. doi:https://doi.org/10.62738/ej.v4i2.85.
- Kim, Eunha. "The Growth, Decline, and Transformation of the Diaconal Ministry and the Role of Women Deaconesses in the Early Churches." *Religions* 14, no. 11 (November 12, 2023): 1415. doi:10.3390/rel14111415.
- Larosa, Setiawan, Serepina Yoshika Hasibuan, and Daniel Daniel. "Metode Pemberdayaan Karunia Dalam 1 Korintus 12:1-31 Bagi Pelayanan Gereja." *Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (December 13, 2023): 89–104. doi:10.37465/shiftkey.v13i2.392.
- Lumintang, Merlin Brenda Angeline. "Resurrection Leadership Sebagai Model Kepemimpinan Bagi Perempuan Awam Merespons Panggilan Misi Allah." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 6, no. 1 (June 15, 2025): 33–49. doi:10.34307/kinaa.v6i1.198.

- Natar, Asnath N. "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (July 30, 2019): 133. doi:10.14421/musawa.2019.182.133-147.
- Pranoto, Minggu Minarto. "PEREMPUAN PEMIMPIN DI GEREJA ISA ALMASIH: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEOLOGI FEMINIS DAN RENEWAL THEOLOGY." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja* 2, no. 2 (2018): 15–31. doi:10.37368/ja.v2i2.29.
- Procter-Smith, Marjorie. "Women and Religion in Modern America." In *The Cambridge History of Religions in America*, 488–510. Cambridge University Press, 2009. doi:10.1017/CHOL9780521871082.024.
- Romeantenan, Nova Linda, and Desi Sianipar. "KEPEMIMPINAN PENDETA PEREMPUAN DI LINGKUP SINODAL GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPB): SUATU TINJAUAN TEOLOGIS-PEDAGOGIS." *Jurnal Shanan* 2, no. 2 (October 1, 2018): 131–58. doi:10.33541/shanan.v2i2.1539.
- Romero Carrasquillo, Francisco J., and Hilaire K. Troyer de Romero. "Aquinas on the Inferiority of Woman." *American Catholic Philosophical Quarterly* 87, no. 4 (2013): 685–710. doi:10.5840/acpq201387452.
- Sartika, Meitha. "Penahbisan Wanita Sebagai Pendeta." *YSLK (Jurnal Pelita Zaman)*, 1997. <https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=775&res=jpz>.
- Stella, Yunita. "Kepemimpinan Wanita Dalam Gereja." *Journal Kerusso* 8, no. 1 (2023): 1–9. doi:10.33856/kerusso.v8i1.267.
- Stephenson, Lisa P. "Feminist and Womanist Pentecostal Theologies: Contributions to the Conversation." *Journal of Pentecostal and Charismatic Christianity* 44, no. 1 (January 2, 2024): 1–2. doi:10.1080/27691616.2024.2335768.
- Sugianto, Edi, and Christian Ade Maranatha. "REFLEKSI BIBLIS-TEOLOGIS TERHADAP TEOLOGI FEMINIS (BIBLIS-THEOLOGICAL REFLECTION OF FEMINIST THEOLOGY)." *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1, no. 2 (2019): 184–209.
- Tampilang, Risno, Feyby Chaeren Letungamu, and Christian Yafet Manambe. "Paul's and the Position of Women in Worship Service: Study of 1 Timothy 2:8-15." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 8, no. 2 (July 31, 2024): 183–202. doi:10.46445/ejti.v8i2.787.
- Tangirerung, Johana Ruadjanna, Judith D. L. Wangania, and Meike Roselyna Tapparan. "Meneroka Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Gereja Dan Masyarakat Toraja." *KURIOS* 10, no. 2 (August 30, 2024): 320–33. doi:10.30995/kur.v10i2.826.
- Westfall, Cynthia Long. *Paul and Gender : Reclaiming the Apostle's Vision for Men and Women in Christ*. Baker Academic, a division of Baker Publishing Group, 2016.
- Zurlo, Gina A., and Dave Coles. "Women, Leadership, and Movements: A Critical Look at the Past, Present, and Future." *Missiology: An International Review* 53, no. 2 (April 13, 2025): 119–30. doi:10.1177/00918296241259205.